

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian menunjukkan demikian besar peranan sektor pertanian dalam menopang perekonomian. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk membangun pertanian dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama bagi daerah untuk menjadi pelaku atau penggerak pembangunan di daerah. Karena itu untuk membangun pertanian, kita harus membangun sumber daya manusia terlebih dahulu.

Sejak tahun 2006 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. UU Nomor 16 tahun 2006 tersebut secara khusus mengamanatkan upaya-upaya untuk terus meningkatkan mutu sumber daya manusia yaitu penyuluh dan petani dalam hal pertanian, perikanan dan kehutanan.

Berdasarkan surat keputusan kepala sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung nomor 0521041/B /IV.01/B/2012, tentang penetapan lokasi kelembagaan penyuluhan pertanian

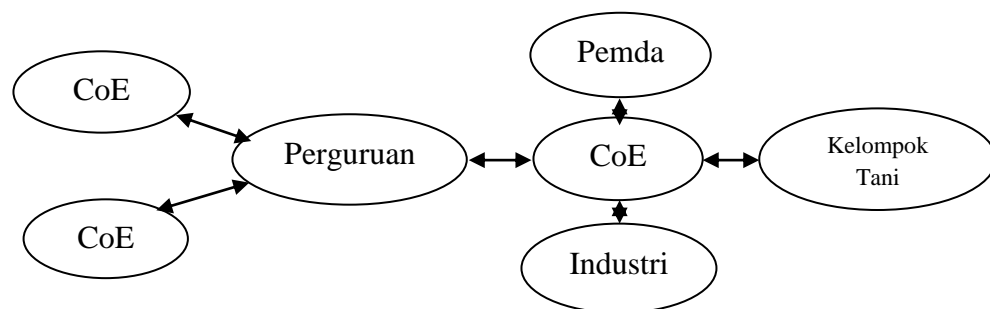
yang difasilitasi Provinsi Lampung tahun 2012, ditetapkan 14 Kabupaten/Kota yang terpilih yang dapat dilihat pada Tabel 50. Lampiran 1.

Menurut Sumaryo .Gs, Dame T. Gultom, Indah Listiana (2012) dari sisi kelembagaan hampir di setiap Kecamatan di Provinsi Lampung telah tersedia Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan, dan Kehutanan (BP3K). Beberapa BP3K sudah memiliki sumber daya yang memadai, termasuk gedung, lahan percobaan, tenaga penyuluh. Namun, dari sisi kinerja sebagian BP3K tersebut masih memiliki kinerja yang sangat memprihatinkan. Lemahnya kinerja sebagian besar BP3K tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia yang ada; lemahnya kemampuan menyusun program berjangka panjang dan berkelanjutan; serta lemahnya daya dukung sarana, prasarana, dan biaya operasional. Selain itu, lemahnya kinerja sebagian besar BP3K karena belum adanya model pengembangan kelembagaan BP3K yang sesuai dengan permasalahan nyata di lapangan. Model pengembangan kelembagaan BP3K sedapat mungkin disusun melalui kajian akademik yang sistematis, sehingga dapat mengantisipasi dan mengakomodasi seluruh dinamika yang terjadi di lapangan.

Model *Center of Excellence* (CoE) adalah suatu model pengembangan kelembagaan yang dirancang oleh pemerintah Provinsi yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang dapat menjadi pusat informasi pertanian, penerapan *Cyber Extension* dan menjadi tempat

bertemunya pihak pemerintah, petani, penyuluh, akademisi, dan praktisi (Zakaria, 2012).

Tahap selanjutnya BP3K sebagai CoE kemudian mengemas program atau kegiatan di wilayahnya. Apabila diperlukan tahap ini dapat melibatkan dinas teknis, industri /swasta, dan kelompok tani (Gambar 1).



Gambar 1. Model pengembangan BP3K menjadi CoE untuk Percepatan Revitalisasi Pertanian

Tujuan penerapan Model CoE pada BP3K terpilih adalah meningkatkan kinerja penyuluh. Dengan keberhasilan penerapan Model CoE pada BP3K diharapkan dapat menjadi jawaban mengenai belum ditemukannya model pengembangan kelembagaan yang sesuai sehingga kinerja penyuluh dapat meningkat dan semakin baik. Pada BP3K yang terpilih dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan tim Akademisi Fakultas Pertanian Lampung. Pendampingan yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan yang dapat diaplikasikan pada kegiatan penyuluhan sehingga sebagai BP3K Model CoE diharapkan kinerja penyuluh dapat meningkat. BP3K yang terpilih sebagai Model CoE tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Daftar BP3K Model CoE Tahun 2012

No	Nama BP3K	Kabupaten/Kota
1	BP3K Terbanggi Besar	Lampung Tengah
2	BP3K Talang Padang	Tanggamus
3	BP3K Batang Hari	Lampung Timur
4	BP3K Menggala	Tulang Bawang
5	BP3K Metro Barat	Kota Metro
6	BP3K Padang Cermin	Pesawaran

Sumber : Laporan Pengembangan BPP/BP3K sebagai CoE Tahun 2011

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) tingkat kinerja penyuluh pada BP3K Model CoE Metro Barat diketahui berada pada klasifikasi sedang dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 64.44% dan penelitian yang dilakukan oleh Simanungkalit (2014) tingkat kinerja penyuluh BP3K Model CoE Padang Cermin berada pada klasifikasi sedang dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 65.13%. Berdasarkan pertimbangan inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk meneliti kinerja penyuluh di BP3K Talang Padang sebagai BP3K Model CoE.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana tingkat kinerja penyuluh pertanian di BP3K Kecamatan Talang Padang?
2. Efektivitas Model *Center of Excellence* terhadap tingkat kinerja penyuluh BP3K Kecamatan Talang Padang?
3. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Talang Padang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini di lakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui tingkat kinerja penyuluh pertanian di BP3K Kecamatan Talang Padang.
2. Mengetahui efektivitas Model *Center of Excellence* terhadap tingkat kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Talang Padang.
3. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh di BP3K Kecamatan Talang Padang.

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai :

1. Bagi BP3K Kecamatan Talang Padang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam pengembangan BP3K sebagai Model *Center of Excellence*.
2. Bagi pihak akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan peningkatan kinerja penyuluh secara lebih mendalam.
3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar untuk memahami permasalahan yang menjadi topik kajian.